

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pembangunan karakter yang merupakan upaya perwujudan amanat Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 dilatarbelakangi oleh realita permasalahan kebangsaan yang berkembang saat ini, seperti: disorientasi dan belum dihayatinya nilai-nilai Pancasila; keterbatasan perangkat kebijakan terpadu dalam mewujudkan nilai-nilai Pancasila; bergesernya nilai etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; mudurnya kesadaran terhadap nilai-nilai budaya bangsa; ancaman disintegrasi bangsa; dan melemahnya kemandirian bangsa (Buku Induk Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa 2010-2025).

Untuk mendukung perwujudan cita-cita pembangunan karakter sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 serta mengatasi permasalahan kebangsaan saat ini, maka Pemerintah menjadikan pembangunan karakter sebagai salah satu program prioritas pembangunan nasional. Semangat itu secara implisit ditegaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2015, di mana pendidikan karakter ditempatkan sebagai landasan untuk mewujudkan visi pembangunan nasional, yaitu “mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila.”

Terkait dengan upaya mewujudkan pendidikan karakter sebagaimana yang diamanatkan dalam RPJPN, sesungguhnya hal yang dimaksud itu sudah tertuang dalam fungsi dan tujuan pendidikan nasional, yaitu “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan ke¹l¹sa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab” (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional).

Dengan demikian, RPJPN dan UUSPN merupakan landasan yang kokoh untuk melaksanakan secara operasional pendidikan budaya dan karakter bangsa sebagai prioritas program Kementerian Pendidikan Nasional 2010-2014, yang dituangkan dalam Rencana Aksi Nasional Pendidikan Karakter (2010) bahwa pendidikan karakter disebutkan sebagai pendidikan nilai, pendidikan budi pekerti, pendidikan moral, pendidikan watak yang bertujuan mengembangkan kemampuan peserta didik untuk memberikan keputusan baik-buruk, memelihara apa yang baik dan mewujudkan kebaikan itu dalam kehidupan sehari-hari dengan sepenuh hati.

Atas dasar itu, pendidikan karakter bukan sekedar mengajarkan mana yang benar dan mana yang salah, lebih dari itu, pendidikan karakter menanamkan kebiasaan (*habituation*) tentang hal mana yang baik sehingga peserta didik menjadi paham (kognitif) tentang mana yang benar dan salah, mampu merasakan (afektif) nilai yang baik dan biasa melakukannya (psikomotor). Dengan kata lain, pendidikan

karakter yang baik harus melibatkan bukan saja aspek “pengetahuan yang baik (*moral knowing*), akan tetapi juga “merasakan dengan baik atau *loving good (moral feeling)*, dan perilaku yang baik (*moral action*). Pendidikan karakter menekankan pada *habit* atau kebiasaan yang terus-menerus dipraktikkan dan dilakukan.

Sebagai contoh, selama ini siswa hanya diajarkan secara teroretis bagaimana menjaga kesehatan lingkungan. Di sisi lain, pembelajaran ini ternyata hanya mengasah pengetahuan saja atau kognitif, tetapi tidak mampu memberikan pengaruh yang mendalam bagi siswa, sehingga ranah efektif dan psikomotornya. Contoh lain misalnya bahwa harus diakui sistem evaluasi Ujian Nasional (UN) memaksa para peserta didik untuk lebih banyak memberdayakan aspek nalar (kognitif) dalam proses belajarnya daripada aspek-aspek lain. Apalagi hanya tiga mata pelajaran inti yang berpengaruh kuat mengontrol nilai kelulusan. Keadaan ini membuat mereka harus berpikir pragmatis, yakni lulus, sekalipun harus mengeluarkan biaya tambahan.

Dengan berdasar pada berbagai kenyataan dan keprihatinan, maka wacana Implementasi Pendidikan Karakter di seluruh satuan pendidikan adalah fenomena yang sangat menarik diperbincangkan saat ini. Secara etimologis, kata karakter bisa berarti tabiat, sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain, atau watak (Tim Redaksi Tesaurus, 2008: 229). Orang berkarakter berarti orang yang memiliki watak, kepribadian, budi pekerti, atau akhlak. Dengan makna seperti ini berarti karakter identik dengan kepribadian atau akhlak. Kepribadian merupakan ciri atau karakteristik atau sifat khas dari diri seseorang yang bersumber dari bentukan-bentukan yang diterima dari lingkungan,

misalnya keluarga pada masa kecil, dan juga bawaan sejak lahir (Koesoema, 2007: 80).

Khalayak tentu tidak sabar menanti implementasi itu dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Awal mula ide pendidikan karakter ini didasari kritik sosial atas proses pendidikan nasional yang lebih dominan mengasah ranah kognitif peserta didik, sedangkan sisi afektif dan psikomotorik tidak mendapatkan jatah seimbang.

Berorientasi kepada hasil (pokoknya lulus) cenderung tidak menghargai proses. Fenomena ini akan membuat materi pelajaran lain terabaikan, termasuk apatis terhadap ranah sikap, nilai, dan keterampilan. Implementasi pendidikan karakter di sekolah sebenarnya tidak harus dengan cara menambah mata pelajaran baru tentang pendidikan karakter secara eksplisit, karena bisa dilakukan dengan cara meninjau kembali dan menajamkan kurikulum sehingga memuat pendidikan karakter dan nilai-nilai yang akan ditransformasikan kepada peserta didik.

Dengan kata lain, strategi implementasi pendidikan karakter di sekolah bukan dalam bentuk penambahan mata pelajaran baru atau dengan merombak kurikulum besar-besaran, melainkan bisa dengan cara mengubah orientasi pembelajaran di sekolah.

Kalau implementasi pendidikan karakter dilakukan dengan cara menambah mata pelajaran baru, tentu akan semakin membebani warga sekolah yang memang sudah sarat beban. Jika pendidikan karakter dijadikan mata pelajaran tersendiri, yang

bertanggung jawab untuk mengawalnya terbatas pada guru pengampu, sebagaimana praktik pendidikan agama dan pendidikan kewarganegaraan saat ini.

Dengan strategi reorientasi pembelajaran, tanggung jawab mendidik karakter anak bukan hanya menjadi tanggung jawab para pendidik di sekolah, tapi juga diperankan oleh pejabat publik. Pejabat publik mulai dari pengurus Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW), otoritas di kelurahan/desa sampai pimpinan pemerintahan tingkat nasional menjadi model pendidikan karakter.

Koesoema (2007:1 36) melalui karyanya yang berjudul Pendidikan Karakter, Strategi Mendidik Anak di Zaman Global, mencoba memetakan jalan implementasi pendidikan karakter melalui strategi reorientasi pembelajaran. Peta yang dibuatnya sangat relevan dijadikan rujukan dalam implementasi pendidikan karakter. Menurutnya ada dua paradigma pembelajaran yang dalam implementasinya harus disinergikan. *Pertama*, memandang pendidikan karakter dalam cakupan pemahaman moral yang lebih sempit. Pola pembelajarannya dilakukan dengan cara menanamkan nilai-nilai moral tertentu dalam diri anak yang bermanfaat bagi perkembangan pribadinya sebagai makhluk individual sekaligus sosial. *Kedua*, melihat pendidikan karakter dari sudut pandang pemahaman isu-isu moral yang lebih luas dengan melihat keseluruhan peristiwa sosial kemasyarakatan dari perspektif pendidikan. Orientasi pembelajaran dengan membahas secara khusus bagaimana nilai-nilai kebebasan tampil dalam kerangka hubungan yang sifatnya lebih struktural, dalam relasinya dengan pelaku pendidikan lain, seperti keluarga, masyarakat dan negara.

Bertolak dari paradigma praksis pendidikan karakter yang diperkenalkan Doni Koesoema, semua guru harus bertanggung jawab untuk menerjemahkan semua ilmu yang diajarkan sampai pada tingkatan hikmah. Hikmah berkaitan dengan nilai-nilai keutamaan yang menjadi pedoman hidup (baca: ajaran agama). Hikmah, atau nilai-nilai keutamaan itu kemudian ditransformasikan dalam proses pembelajaran di kelas.

Dalam kacamata agama, semua mata pelajaran (bidang studi) memiliki satu titik akhir yang sama, yaitu moral ketuhanan, karena semua akan kembali kepada Tuhan, apapun pelajaran itu. Jika semua pihak telah benar-benar mampu melihat titik itu, pendidikan karakter akan tertana dengan sendirinya. Dengan kondisi ini, peserta didik secara tidak langsung selalu diajak untuk merefleksikan dan mencari solusi bersama atas isu-isu moral yang aktual.

Prasyarat utama terbangunnya karakter dan pendidikan nilai-nilai keutamaan adalah kebebasan. Kebebasan ini dapat diartikan tidak ada paksaan, sehingga setiap individu berani berkreasi dan mencurahkan segenap kemampuan untuk merefleksikan nuraninya dalam tindakan nyata. Namun, justru kebebasan inilah yang telah lama terenggut dan tergadaikan dalam proses-proses pengambilan kebijakan politik atau dalam praktik pendidikan. Padahal, tanpa kebebasan, yang terjadi bukanlah pertumbuhan karakter, tetapi praktik pembusukan karakter.

Seorang kepala sekolah yang meloloskan calon siswa baru yang tidak memenuhi standar akibat ada tekanan atau karena menerima bunga-bunga sosial adalah contoh pembusukan karakter. Perilakunya ini sedikit banyak akan berpengaruh

pada para guru untuk melakukan hal yang sama. Pada akhirnya proses pembusukan semakin menjadi-jadi karena dilakukan secara berjamaah oleh seluruh warga sekolah.

Kondisi di atas pada kenyataannya harus diseriisi oleh pihak Sekolah Dasar Negeri 43 Kecamatan Hulontalangi Kota Gorontalo. Berdasarkan observasi awal peneliti selama kurang lebih dua minggu pada bulan November tahun 2011 diketahui bahwa implementasi pendidikan karakter belum secara tematik atau keseluruhan dilaksanakan. Berbagai kendala dihadapi oleh sekolah seperti sulitnya mengubah kebiasaan kurang baik yang sekian lama telah tertanam dalam pikiran anak. Selain itu, kurangnya motivasi atau perhatian orang tua sebagai peletak dasar pertama pendidikan juga turut memberikan kontribusi dalam implementasi pendidikan karakter kepada anak.

Berdasarkan hasil observasi awal tersebut peneliti terdorong untuk mengkaji permasalahan tentang implementasi pendidikan karakter melalui suatu penelitian kualitatif dengan judul penelitian **“Program Pendidikan Karakter di SDN 43 Kecamatan Hulontalangi Kota Gorontalo”**.

B. Fokus Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka fokus masalah penelitian adalah sebagai berikut.

1. Perencanaan pendidikan karakter di SDN 43 Kecamatan Hulontalangi Kota Gorontalo.

2. Pengorganisasian pendidikan karakter di SDN 43 Kecamatan Hulontalo Kota Gorontalo.
3. Pelaksanaan pendidikan karakter di SDN 43 Kecamatan Hulontalo Kota Gorontalo.
4. Monitoring dan evaluasi pendidikan karakter di SDN 43 Kecamatan Hulontalo Kota Gorontalo.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk menggambarkan perencanaan pendidikan karakter di SDN 43 Kecamatan Hulontalo Kota Gorontalo.
2. Untuk menggambarkan pengorganisasian pendidikan karakter di SDN 43 Kecamatan Hulontalo Kota Gorontalo.
3. Untuk menggambarkan pelaksanaan pendidikan karakter di SDN 43 Kecamatan Hulontalo Kota Gorontalo.
4. Untuk menggambarkan monitoring dan evaluasi pendidikan karakter di SDN 43 Kecamatan Hulontalo Kota Gorontalo.

D. Manfaat Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak, antara lain:

1. Peneliti: dapat menambah wawasan dan terutama pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang manajemen pendidikan terkait implementasi pendidikan karakter di SDN 43 Kecamatan Hulontalangi.
2. Kepala Sekolah; dapat memberikan gambaran tentang proses manajemen pengembangan pendidikan karakter di SDN 43 Kecamatan Hulontalangi.
3. Guru; dapat memberikan penjelasan rinci tentang proses implementasi pendidikan karakter dalam pembelajaran, guna memaksimalkan nilai-nilai karakter yang diintegrasikan dalam silabus dan perangkat pembelajaran lainnya.
4. Orang Tua Siswa; dapat memberikan gambaran tentang kebaikan dari fungsi keterlibatan, kerja sama, dan koordinasi pengembangan karakter siswa di sekolah.

E. Definisi Istilah

Guna menghindari kesalahan penafsiran dan untuk memperjelas judul penelitian ini, alangkah baiknya penulis menjelaskan kata-kata operasional yang terdapat pada judul.

Pengelolaan merupakan proses manajerial yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi terhadap sebuah program.

Pengertian karakter menurut Pusat Bahasa Depdiknas adalah “bawaan, hati, jiwa, kepribadian, budi pekerti, perilaku, personalitas, sifat, tabiat, temperamen, watak”. Adapun berkarakter adalah berkepribadian, berperilaku, bersifat, bertabiat, dan berwatak”. Menurut Tadkiroatun Musfiroh (UNY, 2008), karakter mengacu

kepada serangkaian sikap (*attitudes*), perilaku (*behaviors*), motivasi (*motivations*), dan keterampilan (*skills*).

Berdasarkan berbagai uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan program pendidikan karakter di pendidikan karakter di SDN 46 Kecamatan Hulontalo Kota Gorontalo ialah proses manajemen pendidikan karakter ke dalam diri anak yang dilakukan oleh pihak SDN 43 Kecamatan Hulontalo Kota Gorontalo, dengan harapan dapat menghasilkan generasi muda yang cerdas dan berakhlak mulia.